



## **Analisis Potensi Kecamatan Sipirok sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan**

**Syukri Mujahid dan Darwin P. Lubis\***

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi potensi fisik di Kecamatan Sipirok, untuk mengetahui kondisi potensi nonfisik di Kecamatan Sipirok dan untuk mengetahui kesesuaian/kelayakan kecamatan Sipirok menjadi ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah potensi-potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Sipirok, mencakup potensi fisik dan potensi nonfisik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Sipirok sesuai/layak untuk menjadi ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dilihat dari segi faktor fisik, kondisi fisik yang dimiliki Kecamatan Sipirok tidak mendukung kecamatan ini untuk menjadi ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan, terutama dari segi topografi kecamatan ini yang lebih didominasi oleh dataran tinggi dengan kemiringan  $\geq 40\%$ . Dinilai dari segi faktor nonfisik, kondisi nonfisik Kecamatan Sipirok tidak semuanya mendukung kecamatan ini menjadi kota/ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari beberapa indikator aspek nonfisik hanya jumlah penduduk, tenaga kerja dan fasilitas kesehatan yang menunjukkan Kecamatan Sipirok sesuai/layak menjadi ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Secara umum, Kecamatan Sipirok tidak sesuai/layak menjadi ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

**Kata Kunci:** Analisis; Potensi; Ibukota Kabupaten

### **Abstract**

*This study aims to determine the condition of the physical potential in the District Sipirok, to determine the condition of non-physical potential in Sub Sipirok and to determine the suitability / appropriateness subdistrict Sipirok became the capital of South Tapanuli. The population in this study is the potential possessed by the District Sipirok, includes the potential physical and non-physical potential. The data collection technique used is the technique of documentary studies. The results showed that not all the potential possessed by the District Sipirok appropriate / feasible to become the capital of South Tapanuli. In terms of physical factors, physical condition owned by the District Sipirok not support this district to be the capital of South Tapanuli, especially in terms of the topography of this district which is dominated by a plateau with a slope of  $\geq 40\%$ . Assessed in terms of non-physical factors, non-physical condition of the District Sipirok not everyone supported this district into the city / capital of South Tapanuli. Nonphysical aspects of some indicators only the number of population, labor and health facilities that show the District Sipirok appropriate / feasible to be the capital of South Tapanuli. Generally, District Sipirok not appropriate / feasible to be the capital of South Tapanuli.*

*Keywords:* Analysis; Potential: Capital District

**How to Cite:** Mujahid, S. dan Lubis, D.P. (2013). Analisis Potensi Kecamatan Sipirok sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 77-86.

\*Corresponding author:

E-mail: darwinlubisgeo@gmail.com

## PENDAHULUAN

Diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi simbol dari beralihnya sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik. Sebelum undang-undang ini diterbitkan kekuasaan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia sangat sentralistik, dimana kebijakan pembangunan selalu tertumpu di daerah Jawa. "Sehingga, kebijakan seperti ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa", Sugiharto (2006).

Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini juga menjadi awal dari maraknya pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia. Sebab, di dalam pasal 6 ayat 2 undang-undang ini disebutkan bahwa, "daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah". Terhitung pasca undang-undang ini diterbitkan 205 daerah otonom baru telah terbentuk terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota telah dimekarkan. Sehingga sampai dengan sekarang jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 524, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota.

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu daerah yang marak mengalami pemekaran. Daerah tingkat dua terluas di Propinsi Sumatera Utara ini telah empat kali mengalami pemekaran. Diawali dari terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Pembentukan Kota Padang Sidempuan melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2001 dan yang terbaru dengan Undang-Undang No. 37 tahun 2007 dan Undang-Undang No. 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

Maraknya pemekaran yang dialami Kabupaten Tapanuli Selatan mengakibatkan kabupaten ini harus mengalami pemindahan ibukota. Sebelumnya yang menjadi Ibukota dari kabupaten ini adalah Padang Sidempuan,

namun Padang Sidempuan kemudian menjadi salah satu daerah hasil pemekaran dari kabupaten ini. Sehingga, secara tidak langsung Padang Sidempuan sudah tidak merupakan bagian dari daerah Kabupaten Tapanuli Selatan atau dengan kata lain sudah tidak berstatus sebagai ibukota dari kabupaten ini.

Pemindahan ibukota Tapanuli Selatan ditetapkan melalui Undang-Undang No. 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa, "Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan kabupaten induk berkedudukan di Sipirok" dan ayat 2 "Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, secara definitif, pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah berada di Sipirok.

Pemindahan ibukota ini ternyata menimbulkan pro kontra dikalangan elit dan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Disebabkan, sampai dengan sekarang ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan belum juga dipindahkan ke Sipirok. Bahkan dalam salah satu pidatonya Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjabat pada saat itu menyatakan bahwa Kecamatan Sipirok tidak layak menjadi ibukota karena Sipirok rawan gempa dahsyat dalam kurun waktu sekali dalam 30 tahun karena berada tepat di atas Patahan Semangko, secara geografis Sipirok tidak sentralistik dari kecamatan terjauh di Tapanuli Selatan, tinjauan dari ilmu planologi tidak memungkinkan karena daerahnya berbukit, kemudian secara hidrologi juga tidak memungkinkan untuk perkantoran seluas 275 Ha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah disebutkan dalam pasal 12 ayat 3 bahwa, "Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak

geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya". Artinya, penetapan suatu daerah ibukota itu bukan merupakan persoalan politis semata, akan tetapi penetapan ibukota kabupaten harus objektif dan perlu dilakukan pengkajian tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Potensi-potensi daerah dalam ruang lingkup kajian geografi meliputi potensi fisik dan potensi nonfisik. Dimana, potensi fisik meliputi (letak, jarak, luas lahan, keadaan tanah, air tanah, sumber air, sumber mineral, topografi, iklim, bentuk kawasan, flora dan fauna). Potensi nonfisik meliputi sumberdaya manusia (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, mata pencaharian, pendidikan dan kesehatan), industri, sarana dan prasarana/fasilitas (fasilitas pendidikan (perguruan tinggi hingga taman kanak-kanak), fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, posyandu), fasilitas perekonomian (pasar, pertokoan), fasilitas umum (listrik, air bersih, jaringan telepon, bank, pos, pemakaman, rumah ibadah, alat transportasi), fasilitas hiburan (bioskop, taman, tempat wisata) dan aksesibilitas (panjang jalan dan indeks jalan).

Berbagai potensi diatas haruslah dimiliki oleh daerah calon ibukota sebelum ditetapkan menjadi daerah ibukota. Hal ini terkait dengan status kota/ibukota yang akan menjadi tolak ukur dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. Bagaimanakah potensi Kecamatan Sapirook sehingga daerah ini ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan. Pertanyaan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Sapirook untuk menganalisis potensi-potensi daerah di Kecamatan Sapirook sehingga ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sapirook. Adapun alasan penulis

memilih daerah tersebut sebagai lokasi penelitian karena daerah ini ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan serta belum pernah dilakukannya penelitian yang sama dengan topik penelitian yang akan penulis teliti di daerah tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah potensi-potensi daerah yang ada di Kecamatan Sapirook, mencakup potensi fisik di Kecamatan Sapirook, meliputi: luas lahan, sumberdaya air, topografi dan potensi nonfisik di Kecamatan Sapirook, meliputi: (a) sumberdaya manusia (jumlah penduduk, tenaga kerja, mata pencaharian), (b) aksesibilitas, (c) fasilitas umum (fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan). Mengingat data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Selatan atau kantor Kecamatan Sapirook, maka seluruh populasi sekaligus akan menjadi sampel dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah potensi fisik dan potensi non fisik di Kecamatan Sapirook dan yang menjadi variabel bebas adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumenter. Dimana, data dapat dikumpul dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun, jika data tidak tersedia di BPS Kabupaten Tapanuli Selatan mengingat Kabupaten ini terus mengalami pemekaran, maka data dapat dikumpul dari kantor Kecamatan Sapirook.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif. Teknik analisa ini digunakan karena penelitian ini lebih bersifat eksploratif dimana data-data yang didapatkan secara sekunder akan disesuaikan dengan teori-teori.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data-data yang dianalisis dalam tulisan ini adalah data-data mengenai

“Potensi Kecamatan Sipirok Sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan”. Pasca pengumpulan data-data, maka data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Potensi Fisik, meliputi: Luas lahan; Sumberdaya air; Topografi; Potensi Nonfisik, meliputi: Sumberdaya manusia; Adapun hal yang dilihat di dalamnya adalah: Jumlah penduduk; Tenaga kerja; Mata Pencarian; Aksesibilitas; Fasilitas umum. Adapun hal yang dilihat di dalamnya adalah: Fasilitas perekonomian; Fasilitas pendidikan; Fasilitas kesehatan.

Manusia membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin besar kebutuhan manusia tersebut maka kebutuhannya terhadap lahan juga semakin bertambah. Kebutuhan akan lahan ini akan menghadirkan pola penggunaan lahan tersebut. Di daerah perkotaan lahan digunakan untuk tempat pemukiman yang relatif lebih padat, perkantoran, pelayanan jasa, pasar, jaringan jalan, terminal, industri dan lain sebagainya sesuai kebutuhan dan karakteristik kota.

Luas lahan di wilayah Kecamatan Sipirok secara keseluruhan adalah seluas 535,99 km<sup>2</sup> atau sekitar 53.599 Ha. Desa/kelurahan yang memiliki lahan paling luas adalah Desa Marsada dengan luas 42,40 km<sup>2</sup>, sedangkan desa/kelurahan yang paling sempit/kecil adalah Desa Simaninggir dengan luas 1,40 km<sup>2</sup>. Secara penggunaannya, lahan di kecamatan Sipirok dapat dilihat dari beberapa jenis penggunaan lahan yang terdiri dari persawahan, pekarangan, kebun, ladang, hutan negara, hutan rakyat, perkebunan, pengembalian, kolam, lahan kosong dan lain-lain. Apabila dirincikan lagi, maka penggunaan lahan-lahan tersebut diatas dapat dibagi atas dua yaitu lahan pertanian dan lahan nonpertanian. Lahan pertanian terdiri dari persawahan, kebun, ladang, hutan negara, hutan rakyat, perkebunan dan kolam. Sehingga apabila ditotal maka keseluruhan luas penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Sipirok adalah 34.408,6 Ha. Sedangkan yang

termasuk kepada nonpertanian adalah pekarangan, pengembalian, lahan kosong dan lain-lain. Sehingga luas total penggunaan lahan non pertanian di Kecamatan Sipirok adalah 19.190,4 Ha.

Sumberdaya air bagi masyarakat Sipirok secara keseluruhan berasal dari air tanah dangkal. Air ini diperoleh masyarakat dengan cara menggali sumur-sumur kecil. Dengan menggali sumur kecil ini akan diperoleh mata air yang kemudian dimanfaatkan masyarakat Sipirok untuk keperluan hidup sehari-hari.

Di Kecamatan Sipirok sumberdaya air belum ada dikelola oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Salah satu penyebabnya adalah di Kecamatan Sipirok tidak terdapat sungai yang menjadi sumber air baku bagi PDAM.

Keadaan topografi wilayah Kecamatan Sipirok adalah daerah yang datar sampai berombak 12%, berombak sampai berbukit 22%, dan berbukit sampai bergunung 66%. Desa/kelurahan dengan kemiringan 2 - 15% terluas berada di Desa Pahae Aek Sagala seluas 17,64 km<sup>2</sup> dan yang terkecil adalah Desa Sarogodung seluas 2,34 km<sup>2</sup>. Desa/kelurahan terluas dengan kategori kemiringan 15 - 40% adalah Kelurahan Parau Sorat seluas 25,05 km<sup>2</sup> dan yang terkecil adalah Desa Simaninggir seluas 1,40 km<sup>2</sup>. Sedangkan, desa/kelurahan terluas dengan kategori kemiringan  $\geq 40\%$  adalah Desa Marsada seluas 39,19 km<sup>2</sup> dan yang terkecil adalah Desa pangurabaan seluas 1,13 km<sup>2</sup>.

Kriteria suatu daerah sebagai kota dapat dilihat dari jumlah penduduknya. Alasan utama yang muncul mengapa jumlah penduduk ini digunakan sebagai salah satu hal yang dilihat adalah adanya kenyataan bahwa sejumlah penduduk yang terkonsentrasi pada sesuatu tempat tersebut telah mampu mengakibatkan muncul dan tumbuhnya fungsi-fungsi tertentu sebagaimana layaknya sebuah kota.

Akan tetapi, banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai sebuah potensi murni dari aspek penduduk dalam

konteks potensi sumberdaya manusia (SDM) yang dapat menunjang kemajuan wilayah tersebut, karena adakalanya penduduk dapat menjadi beban dalam pembangunan. Hal ini terkait jumlah penduduk yang banyak dengan pendapatan wilayah tersebut dalam penghitungan perkapitanya dimana pendapatan negara atau suatu daerah dibagi jumlah penduduk di negara atau daerah tersebut

Jumlah keseluruhan penduduk yang terdapat di Kecamatan Sipirok adalah 33.982 jiwa. Desa/kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kelurahan Pasar Sipirok dengan jumlah 4.506 jiwa, sedangkan desa/kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Janji Mauli dengan jumlah 137 jiwa.

Penduduk yang dikatakan sebagai potensi SDM adalah yang produktif dalam artian mampu bekerja (tenaga kerja) atau bukan penduduk yang tidak mampu bekerja. Sementara penduduk yang tidak bekerja membutuhkan makan, sandang dan kebutuhan lainnya, namun mereka tidak bisa bekerja maka mereka dapat menjadi beban bagi keluarganya dan daerahnya. Tenaga kerja yang dimaksud adalah jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja yang diklasifikasikan dengan rentang usia antara 15 - 64 tahun. Jumlah usia produktif penduduk Kecamatan Sipirok dapat dilihat pada tabel berikut.

Wilayah Kecamatan Sipirok memiliki jumlah penduduk produktif yang cukup banyak yaitu 23.576 jiwa atau 69,37% dari jumlah penduduk keseluruhan. Masing-masing desa/kelurahan memiliki angka dan persentase yang berbeda. Persentase penduduk usia produktif menurut penghitungan ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif paling tinggi adalah Kelurahan Huta Suhut (75,76%) dan yang paling rendah adalah Desa Siala Gundi (60,48%).

Perhitungan angka jumlah penduduk usia produktif suatu desa/kelurahan terhadap seluruh jumlah penduduk yang

ada di wilayah Kecamatan Sipirok menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki angka usia produktif paling banyak adalah Kelurahan Pasar Sipirok dengan jumlah 3.317 jiwa dan yang paling sedikit adalah Desa Janji Mauli dengan jumlah 97 jiwa. Hal ini disebabkan karena Kelurahan Pasar Sipirok adalah kelurahan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di wilayah Kecamatan Sipirok yaitu 4.506 jiwa atau 13,25% dari jumlah penduduk keseluruhan.

Di wilayah Kecamatan Sipirok terdapat sebanyak 12.533 jiwa penduduk yang bekerja sebagai petani, 1.446 jiwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1.285 jiwa bekerja di perdagangan besar, rumah makan dan hotel serta 804 jiwa bekerja di bidang jasa kemasyarakatan.

Tingkat aksesibilitas di suatu daerah dapat dilihat dari kualitas jalan yang ada di daerah tersebut. Kualitas jalan di Kecamatan Sipirok dapat dilihat dari jenis permukaannya dan kondisi jalan. Berdasarkan jenis permukaannya, panjang jalan yang diaspal (hotmix + lapen) di wilayah Kecamatan Sipirok adalah 67,69 km, panjang jalan kerikil + batu 22,57 km dan panjang jalan tanah 70,91 km.

Selain berdasarkan jenis permukaan jalan, kualitas jalan di suatu daerah juga dapat dinilai dari kondisi jalan. Berdasarkan kondisinya, jalan di Kecamatan Sipirok masih lebih banyak/panjang dengan kondisi rusak.

Berdasarkan kondisi jalan di Kecamatan Sipirok, jalan dengan kondisi rusak menjadi jalan terpanjang yaitu 64,46 km, kemudian jalan dengan kondisi baik sepanjang 45,12 km, kemudian jalan dengan kondisi sedang sepanjang 38,70 km dan jalan dengan kondisi rusak berat dengan panjang 12,89 km.

Pasar merupakan salah satu fasilitas perekonomian masyarakat. Akan tetapi, di Kecamatan Sipirok belum ini ditemukan pasar permanen atau pasar yang terbuka setiap hari sebagai tempat transaksi perekonomian masyarakat. Di wilayah kecamatan ini pasar masih bersifat pekan

atau dibuka berdasarkan hari-hari tertentu. Fasilitas pendidikan merupakan sarana untuk melaksanakan proses pendidikan formal. Dapat dinilai dari keberadaan sarana gedung SD, SLTP, SLTA, Akademik dan Perguruan Tinggi. Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kecamatan Sipirok masih hanya sebatas pendidikan tingkat SD, SLTP dan SLTA, karena di Kecamatan Sipirok belum tersedia pendidikan untuk jenjang Perguruan Tinggi atau sederajatnya.

Selain itu, bangunan pasar di Kecamatan Sipirok hanya terdapat dua bangunan. Satu bangunan pasar terdapat di Kelurahan Pasar Sipirok dan satu bangunan pasar lagi terdapat di Desa Pangaribuan. Dua daerah inilah yang dijadikan oleh Sipirok sebagai tempat bertransaksi setiap minggunya. Dimana, pekan di Kelurahan Pasar Sipirok dibuka pada hari Senin dan Kamis, sedangkan di Desa Pangaribuan di buka pada hari Selasa.

Selain pasar, toko juga merupakan salah satu tempat transaksi ekonomi yang bersifat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dalam hal ini, toko yang dimaksud adalah Ruko (Rumah Toko). Secara keseluruhan jumlah ruko yang ada di Kecamatan Sipirok berjumlah 27 toko. Kesemua toko tersebut terdapat di Kelurahan Pasar Sipirok.

Keberadaan fasilitas kesehatan di suatu daerah merupakan salah satu indikator kualitas kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Kemudian hal ini juga merupakan salah satu daya tarik bagi masyarakat luar datang ke daerah tersebut untuk mendapatkan layanan kesehatan. Fasilitas yang dimaksud adalah jumlah sarana kesehatan meliputi Rumah Sakit (RS), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan apotek/toko obat.

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Sipirok dengan jenis rumah sakit hanya tersedia di Kelurahan Sipirok Godang sebanyak 1 unit. Puskesmas juga hanya berjumlah 1 unit dan terdapat di Kelurahan Pasar Sipirok. Puskesmas Pembantu (Pustu) yang biasanya tersedia

di desa sebagai salah satu fasilitas kesehatan masyarakat desa tersedia sebanyak 12 unit yang tersebar di Kelurahan Baringin, Kelurahan Parau Sorat, Desa Siala Gundi, Desa Bulu Mario, Kelurahan Bunga Bondar, Desa Sampean, Desa Situmba, Desa Batang Tura, Desa Sarogodung, Desa Dolok Sordang, Desa Dolok Sordang Julu dan Desa Marsada. Sedangkan apotek/toko obat terdapat 2 unit yang keduanya berada di Kelurahan Pasar Sipirok.

Di daerah perkotaan aktivitas manusia lebih kompleks daripada di daerah pedesaan. Kompleksnya aktivitas di daerah perkotaan ini mengakibatkan penggunaan lahan menjadi lebih bervariasi, sehingga membutuhkan lahan yang cukup (luas) sebagai tempat dari segala aktivitas perkotaan.

Sinulingga (1999) menganalisis penggunaan lahan kota berdasarkan pusat pelayanan dengan jumlah penduduknya, dimana "untuk kota sebagai sub wilayah dengan jumlah penduduk 200.000 – 500.000 jiwa memerlukan luas lahan 36.000 m<sup>2</sup>, untuk kota lebih berkembang di atas 800.000 jiwa lahan yang dibutuhkan adalah 100.000 – 120.000 m<sup>2</sup>".

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan menunjukkan bahwasanya total keseluruhan luas lahan di Kecamatan Sipirok adalah 535,99 km<sup>2</sup> atau 53.599 Ha atau 535.990.000 m<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 33.982 jiwa. Dilihat dari luas tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sipirok tentunya sangat potensial menjadi daerah ibukota mengingat luasnya lahan yang dimiliki oleh kecamatan ini.

Sementara itu, Sadyohutomo (2008) mengidentifikasi penggunaan lahan perkotaan, dimana "lahan perkotaan di dominasi oleh jenis penggunaan nonpertanian, seperti perumahan/permukiman, jasa (services), perdagangan, dan industri". Dari keseluruhan luas lahan yang dimiliki oleh Kecamatan Sipirok, penggunaan lahannya lebih dominan pertanian daripada

nonpertanian, yaitu 34.408,6 Ha untuk lahan pertanian dan 19.190,4 Ha untuk lahan nonpertanian. Artinya, dari segi penggunaan lahannya Kecamatan Sipirok belum sesuai atau layak dikategorikan sebagai ibukota bagi Kabupaten Tapanuli Selatan karena penggunaan lahannya masih lebih dominan di sektor pertanian, ditambah lagi dengan masih banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan.

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi manusia, kegunaannya antara lain untuk keperluan air minum, mandi, memasak, dan termasuk keperluan industri. Dengan kata lain, air materi yang dapat membuat kehidupan dapat terjadi di bumi. Semua organisme yang hidup tersusun dari sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas metabolisme mengambil tempat dilarutan air.

Masyarakat di perkotaan juga membutuhkan air sebagai salah satu kebutuhan hidupnya. Mengenai sumber air di daerah perkotaan Sadyohutomo (2008) mengungkapkan bahwa, "kebutuhan air bersih di perkotaan perlu ditangani secara massal dalam bentuk penyediaan fasilitas jaringan pipa air minum. Pengelola fasilitas ini umumnya dalam bentuk perusahaan daerah yang disebut PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Sumber air baku PDAM sebagian besar mengandalkan air sungai".

Berdasarkan kondisi diatas, Kecamatan Sipirok belum sesuai atau layak menjadi ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini disebabkan, berdasarkan hasil penelitian di kecamatan ini diketahui bahwa kecamatan ini belum memiliki PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sebagai *supplier* air bersih. Salah satu penyebab dari tidak adanya PDAM di kecamatan ini karena di Kecamatan Sipirok ini tidak terdapat sungai, dimana sungai merupakan sumber air baku bagi PDAM.

Dalam suatu organisasi atau kelompok komunikasi merupakan alat penting untuk menciptakan suatu kerja sama. Penyampaian informasi yang akurat dan adanya pemahaman informasi dari

satu unit ke unit lain merupakan kegiatan yang vital terutama dalam perumusan dan penerapan tujuan-tujuan dari organisasi.

Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak, komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Manusia sejak dilahirkan sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. Gerak dan tangis yang pertama pada saat ia dilahirkan adalah suatu tanda komunikasi.

Berkomunikasi pada hakekatnya merupakan sebuah transaksi manusia, dan komunikasi itu merupakan suatu proses dan bukan tujuan. Komunikasi memungkinkan proses manajemen dan bertindak sebagai penghubung dalam pelaksanaannya.

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu dengan "*communicare*" yang berarti sama. Dalam bahasa Inggris disebut *Communication* yang berasal dari kata *Comunis* yang artinya sama pengertiannya. Untuk lebih jelasnya berikut ini di kemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian komunikasi yaitu sebagai berikut.

Depari dalam Widjaja (2008: 1-2), memberikan pengertian komunikasi: Topografi yang ideal bagi daerah kota/ibukota adalah topografi dengan kemiringan 15 - 40 %. Hal ini disebabkan karena topografi dengan kemiringan ini cenderung datar, sehingga lebih mudah untuk melakukan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Sipirok termasuk ke dalam kriteria wilayah yang bertopografi kasar. Sebagian besar wilayah Kecamatan Sipirok berada pada kemiringan  $\geq 40\%$ , yaitu seluas 355,30 km<sup>2</sup>. Hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya perbukitan yang ada di Kecamatan Sipirok, antara lain: Tor Sibuat-buali, Tor Simago-mago, Tor Sibohi, Tor Sibuni-buni, Tor Sarogodung, dan Dolok Lampesong. Sementara itu, luas wilayah Kecamatan Sipirok dengan kemiringan 15 - 40% (kondisi ideal daerah kota/ibukota) adalah sekitar 122,68 km<sup>2</sup> dan luas wilayah Kecamatan Sipirok

dengan kemiringan 2 – 15% adalah sekitar 58,01 km<sup>2</sup>.

Melihat kondisi topografi wilayah Kecamatan Sipirok yang lebih di dominasi kemiringan > 40%, tentunya kecamatan ini kurang sesuai menjadi daerah ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini disebabkan karena, pembangunan daerah perkotaan akan sulit dilakukan di wilayah yang lebih di dominasi oleh dataran tinggi atau setidaknya membutuhkan biaya yang sangat banyak dibandingkan dengan dataran rendah.

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator yang menentukan suatu daerah menjadi kawasan kota/ibukota. Semakin banyak jumlah penduduknya tentunya akan semakin banyak pula jumlah sumberdaya manusia sehingga jumlah tenaga kerja juga akan semakin bertambah. Sebab, suatu kota/ibukota harus bisa memenuhi kebutuhannya akan tenaga kerja dengan sumberdaya manusianya sendiri. Batas minimal jumlah penduduk yang harus dimiliki oleh daerah kota/ibukota yaitu 10.000 jiwa.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah keseluruhan penduduk yang ada di kecamatan Sipirok adalah 33.982 jiwa. Artinya, jika dilihat dari jumlah penduduk Kecamatan Sipirok telah sesuai/layak menjadi daerah ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penduduk yang dikatakan sebagai potensi SDM adalah yang produktif dalam artian mampu bekerja (tenaga kerja) atau bukan penduduk yang tidak mampu bekerja. Sementara penduduk yang tidak bekerja membutuhkan makan, sandang dan kebutuhan lainnya, namun mereka tidak bisa bekerja maka mereka dapat menjadi beban bagi keluarganya dan daerahnya. Tenaga kerja yang dimaksud adalah jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja yang diklasifikasikan dengan rentang usia antara 15 – 64 tahun.

Dari hasil penelitian di Kecamatan Sipirok, jumlah penduduk usia produktifnya berjumlah 23.576 jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk yang termasuk kategori usia nonproduktif

berjumlah 10.406 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kecamatan Sipirok lebih dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia nonproduktif. Artinya, jika dilihat dari jumlah penduduk usia produktif, Kecamatan Sipirok telah sesuai/layak menjadi kota/ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dilihat dari mata pencahariannya, masyarakat kota lebih cenderung bergerak di bidang nonagraris atau tidak lebih dari 25% masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Oleh karena itu, mata pencaharian menjadi salah satu indikator suatu daerah itu sesuai/layak disebut dengan kota atau tidak.

Dari 23.576 jiwa atau sekitar 69,37% dari keseluruhan penduduk di Kecamatan Sipirok yang termasuk kedalam usia produktif. Diantara jumlah penduduk produktif tersebut terdapat 31,84% atau sekitar 7.508 jiwa yang tidak termasuk angkatan kerja disebabkan masih sekolah, sedangkan sisanya 16.068 jiwa yang termasuk ke dalam angkatan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 12.533 (78%) jiwa penduduk yang bekerja sebagai petani, 1.446 jiwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (9%), 1.285 jiwa (8%) bekerja di perdagangan besar, rumah makan dan hotel serta 804 jiwa (5%) bekerja di bidang jasa kemasyarakatan.

12.533 (78%) jiwa penduduk di Kecamatan Sipirok yang bekerja sebagai petani, sedangkan penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian berjumlah 3535 jiwa (22%). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, jika ditinjau dari segi mata pencaharian penduduknya, Kecamatan Sipirok belum sesuai/layak menjadi ibukota dari

Aksesibilitas tidak hanya mempunyai peranan penting dalam kelancaran aksesibilitas di kota, tetapi juga terpenting dalam membentuk tata ruang kota. Dapat dikatakan terpenting karena biasanya yang menjadi masalah dalam kelancaran aksesibilitas kota ialah keadaan jalan yang



tidak memadai. Sehingga memengaruhi kelancaran aksesibilitas di perkotaan.

Dari hasil penelitian di Kecamatan Sipirok, jenis permukaan jalan tanah lebih panjang dibandingkan dengan jenis permukaan jalan yang lain yaitu 70,91 km, kemudian jenis permukaan aspal (hotmix + lapen) 67,69 km dan kerikil + batu 22,57 km. Sedangkan kondisi jalan yang ada di Kecamatan Sipirok, panjang jalan dengan kondisi rusak lebih panjang dibandingkan kondisi jalan yang lain yaitu 64,46 km, kondisi baik 45,12 km, kondisi sedang 38,70 km dan kondisi rusak berat 12,89 km.

Dilihat dari jenis permukaan dan kondisi jalan yang ada di Kecamatan Sipirok aksesibilitas di kecamatan ini sangat buruk, karena jenis permukaan jalan tanah lebih panjang dan kondisi jalan yang rusak juga lebih panjang. Artinya, jika dilihat dari aksesibilitasnya, Kecamatan Sipirok belum sesuai/layak menjadi ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Keberadaan pasar dan pertokoan pada suatu daerah akan lebih mempercepat perkembangan daerah tersebut. Kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dapat pula menjadi daya tarik bagi masyarakat wilayah lain untuk datang ke daerah tersebut untuk mendapatkan barang-barang pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sinulingga (1999) menjelaskan, "apabila penduduk sudah mencapai 2.500 jiwa maka sudah diperlukan fasilitas perbelanjaan ± 6 buah toko. Untuk lingkungan dengan penduduk 30.000 jiwa sudah diperlukan kompleks pertokoan yang mungkin dilengkapi dengan *super market* yang setara dengan ± 60 toko yang menjual berbagai komoditi perdagangan".

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sipirok, fasilitas perekonomian di kecamatan ini masih sangat sederhana dan minim. Dimana, belum adanya pasar permanen (buka setiap hari) di kecamatan ini. Pasar di kecamatan ini masih memakai sistem pekan. Ditambah lagi dengan jumlah toko yang hanya berjumlah 27 buah toko dan hanya ada di Kelurahan

Pasar Sipirok dari 40 jumlah desa/kelurahan.

Melihat jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sipirok sebanyak 33.982 jiwa, harusnya di kecamatan ini harus memiliki sekurang-kurangnya 60 buah toko. Karena, apabila jumlah penduduk sudah mencapai 30.000 jiwa dibutuhkan minimal 1 buah super market atau setara dengan 60 buah toko. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan apabila dilihat dari fasilitas perekonomian, Kecamatan Sipirok belum sesuai/layak menjadi ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan teori tentang fasilitas pendidikan kota, apabila penduduk sudah berjumlah 6.000 jiwa maka dibutuhkan 4 buah SD, 2 buah SMP dan 1 buah SMA. Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sipirok, kebutuhan Kecamatan ini akan fasilitas pendidikan belum tercukupi. Di kecamatan ini terdapat 46 buah SD, 6 buah SMP dan 3 buah SMA dari 33.982 jiwa jumlah penduduk. Hanya jumlah SD yang telah tercukupi di Kecamatan Sipirok.

Melihat kondisi jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Sipirok, menunjukkan bahwasanya kecamatan ini belum sesuai atau layak menjadi ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Fasilitas kesehatan juga merupakan salah satu indikator suatu daerah itu bisa dikategorikan sebagai kota atau tidak. Suatu daerah yang termasuk kategori kota apabila memiliki jumlah penduduk 30.000 jiwa sudah memiliki 1 buah rumah sakit, 1 buah puskesmas, 5 buah puskesmas pembantu dan 3 buah apotek/toko obat.

Hasil penelitian di Kecamatan Sipirok menunjukkan bahwasanya, kecamatan ini telah memiliki fasilitas kesehatan yang cukup baik. Kecamatan ini telah memiliki 1 buah rumah sakit, 1 buah puskesmas, 12 buah puskesmas pembantu dan 2 buah apotek/toko obat. Berdasarkan jumlah fasilitas kesehatan tersebut, Kecamatan Sipirok sudah sesuai atau layak menjadi ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

## SIMPULAN

Dilihat dari potensi fisik, potensi fisik yang dimiliki Kecamatan Sipirok tidak mendukung kecamatan ini untuk menjadi kota/ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan, terutama dari segi topografi kecamatan ini yang lebih didominasi oleh dataran tinggi. Dinilai dari potensi nonfisik, kondisi nonfisik Kecamatan Sipirok tidak semuanya mendukung kecamatan ini menjadi kota/ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari beberapa indikator hanya jumlah penduduk, tenaga kerja dan fasilitas kesehatan yang menunjukkan Kecamatan Sipirok sesuai/layak menjadi ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dilihat dari secara umum, Kecamatan Sipirok tidak sesuai/layak menjadi kota/ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. 2008. Analisis Potensi Kabupaten Batu Bara Dalam Penentuan Ibukota Kabupaten. Skripsi (tidak diterbitkan): Medan.
- arigan, R., 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bintarto, R. 1979. Metode Analisa Geografi. Jakarta: LP3ES.
- Bintarto, R. 1989. Interaksi Desa Kota. Yogyakarta: Puspis UGM.
- Daldjoeni, N. 1987. Geografi Kota Dan Desa. Bandung: Alumni.
- Koestoer, R.H., dkk. 2001. Dimensi Keruangan Kota. Teori Dan Kasus. Jakarta: UI Press.
- Lubis, P. 1998. Sipirok Na Soli. Medan: Badan Pengkajian Pembangunan Sipirok (BPPS) dan Penerbit Universitas Sumatera Utara (USU Press).
- Lubis. S., (2012), Analisis Profesionalisme Guru Berdasarkan Undang-Undang RI NO. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Studi Kasus Guru SD Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 52-66
- Rinaldi, R., (2012), Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 22- 34
- Ritonga, A., dkk. 2003. Kependudukan Dan Lingkungan Hidup. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Rizal, M.F., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2): 112-129
- Rosmaniar P., (2012), Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada di Kabupaten Aceh Tenggara), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 1-2
- Sadyohutomo. 2008. Manajemen Kota Dan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiawan, E. dkk. 1997. Geografi SMU Kelas 2. Bandung: Alumni.
- Sinulingga, B.D., 1999. Pembangunan Kota. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sirait, R.S.M.P., (2011), Analisis Pelayanan Publik Terhadap Administrasi Penerbitan Akta Kelahiran (Studi Pada Dinas Kependudukan Kota Medan), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2): 232-249
- Sudarto, (2011), analisis kompetensi dan kinerja aparatur pada Dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten karo, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 102-111
- Sugiharto. 2006. Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah. Medan: USU Press.
- TSiregar, H., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 51-64
- Yunus, H.S., 2005. Manajemen Kota Perspektif Spasial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.